



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

# DINAS KESEHATAN

Jalan Jend. Sudirman No.1 - Kota Payakumbuh

Telepon 0752-92418, Faks 0752-92172

e-mail: [dinaskesehatankablimapuluhkota@yahoo.co.id](mailto:dinaskesehatankablimapuluhkota@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR: 440/ 47 /Diskes.1/2022

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam DPA-OPD Tahun Anggaran 2022 yang mengandung pengadaan barang/jasa, diperlukan organisasi pengadaan barang/jasa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Pengguna Anggaran.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewengan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemeritahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor G3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016, Nomor 15);

- menetapkan rancangan kontrak; dan/atau:
- menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga;
- e. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- f. menetapkan tim pendukung;
- g. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- i. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- j. mengendalikan Kontrak;
- k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- m. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- n. menilai kinerja Penyedia.
- o. melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, meliputi:
  - 1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
  - 2) mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2022.

Ditetapkan di : Payakumbuh  
 Pada tanggal : 24 Januari 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN  
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

**dr.H.ADEL NOFIARMAN**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 196509141998031002

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 74 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 74);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 92);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Barang/jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan pengadaan untuk ditetapkan oleh PA/KPA, meliputi:
  - b. Identifikasi kebutuhan barang/jasa;
  - c. Penetapan barang/jasa yang dibutuhkan;
    - a. Cara pengadaan barang/jasa;
    - b. Jadwal pengadaan barang/jasa yang direncanakan;
    - c. Anggaran pengaaan;
  - d. Melaksanakan persiapan pengadaan, meliputi:
    - menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
    - menetapkan HPS;

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 440/ 47 /Diskes.1/2022  
 TANGGAL : 24 JANUARI 2022  
 TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN				
		STRUKTURAL	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU		
1	2	3	4	5		
1	dr. H. ADEL NOFIARMAN NIP. 19650914 199803 1 002 Pembina Utama Muda/ IV. C	KEPALA DINAS KESEHATAN	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN</b>			
			<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (DINAS KESEHATAN)	88.794.500		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (DINAS KESEHATAN)	494.350.000		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (DINAS KESEHATAN)	31.555.000		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (DINAS KESEHATAN)	23.295.000		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (DINAS KESEHATAN)	10.000.000		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (DINAS KESEHATAN)	14.168.800		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (DINAS KESEHATAN)	436.908.800		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DINAS KESEHATAN)	292.676.500		
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (DINAS KESEHATAN)	15.000.000		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (DINAS KESEHATAN)	15.655.000		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (DINAS KESEHATAN)	5.780.000		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DINAS KESEHATAN)	6.040.000		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (DINAS KESEHATAN)	13.825.000		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (DINAS KESEHATAN)	11.887.500		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (DINAS KESEHATAN)	11.812.500		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (DINAS KESEHATAN)	5.185.000		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (DINAS KESEHATAN)	15.200.000		
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (DINAS KESEHATAN)	45.880.000		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (DINAS KESEHATAN)	142.890.000		
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan (DINAS KESEHATAN)	58.694.000		
					<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	
					<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
					Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (DINAS KESEHATAN)	15.635.000
					<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
					Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (DINAS KESEHATAN)	15.765.000
					<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (DINAS KESEHATAN)	17.315.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>1.788.312.600</b>			

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN		
		STRUKTURAL	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU
1	2	3	4	5
2	drg, YENNI IRMANDRIANI NIP. 19741205 200604 2 010 Pembina / IV a	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b> <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS KESEHATAN) 30.095.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (DINAS KESEHATAN) 6.564.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (DINAS KESEHATAN) 7.636.000 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (DINAS KESEHATAN) 6.770.000 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (DINAS KESEHATAN) 9.180.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DINAS KESEHATAN) 31.410.000  <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS KESEHATAN) 62.948.794.956 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DINAS KESEHATAN) 81.750.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DINAS KESEHATAN) 10.338.000  <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b> Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (DINAS KESEHATAN) 4.200.000  <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b> Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (DINAS KESEHATAN) 26.345.000  <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS KESEHATAN) 10.028.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS KESEHATAN) 66.000.000 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (DINAS KESEHATAN) 67.285.400 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan (DINAS KESEHATAN) 3.360.000 Fasilitas Kunjungan Tamu (DINAS KESEHATAN) 26.280.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS KESEHATAN) 201.577.000  <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS KESEHATAN) 339.430.000 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS KESEHATAN) 88.746.600 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS KESEHATAN) 148.800.000  <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (DINAS KESEHATAN) 55.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS KESEHATAN) 278.160.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS KESEHATAN) 20.100.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (DINAS KESEHATAN) 49.600.000  <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b> Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (DINAS KESEHATAN) 22.612.500	
			<b>JUMLAH</b>	<b>64.540.062.456</b>

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN		
		STRUKTURAL	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU
1	2	3	4	5
3	ALI AMRAN, SKM, MKM NIP. 19650305 199003 1 005 Pembina / IV a	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (DINAS KESEHATAN)	348.825.000
			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	
			<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Pengembangan Puskesmas (DINAS KESEHATAN)	6.573.500.000
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya (DINAS KESEHATAN)	264.321.000
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan (DINAS KESEHATAN)	115.000.000
			Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DINAS KESEHATAN)	1.965.116.020
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DINAS KESEHATAN)	6.985.740.000
			Pengadaan Obat, Vaksin (DINAS KESEHATAN)	1.970.850.000
			Pengadaan Bahan Habis Pakai (DINAS KESEHATAN)	1.868.662.000
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (DINAS KESEHATAN)	174.546.000
			<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	
<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>				
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (DINAS KESEHATAN)	52.218.000			
<b>JUMLAH</b>			<b>20.318.778.020</b>	
4	dr. ERVA YORA NIP. 19761024 200901 2 002 Pembina / IV a	KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN</b>	
			<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (DINAS KESEHATAN)	9.614.690.400
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (DINAS KESEHATAN)	763.200.000
			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus (DINAS KESEHATAN)	49.560.000
<b>JUMLAH</b>			<b>10.427.450.400</b>	
5	dr. Ratmi NIP.19701017 201001 2 001 Penata Tk. I / III d	KEPALA UPTD PUSKESMAS TANJUNG PATI	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
			<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Tanjung Pati)	1.767.474.770
			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	
			<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Tanjung Pati)	686.715.000			
<b>JUMLAH</b>			<b>2.454.189.770</b>	

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN		
		STRUKTURAL	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU
1	2	3	4	5
6	Tuti Dwi Putri, S.Kep NIP.19791003 200604 2 016 Penata Muda Tk. I / III. b	KEPALA UPTD PUSKESMAS GUNUNG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Gunung Malintang)	308.922.540
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Gunung Malintang)	301.874.000			
			<b>JUMLAH</b>	<b>610.796.540</b>
7	Loli Nasriwati, A.Md,Kep NIP.19831224 200901 2 001 Penata Muda Tk. I / III. b	Pit. KEPALA UPTD PUSKESMAS TARAM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Taram)	1.048.830.960
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas	452.810.000			
			<b>JUMLAH</b>	<b>1.501.640.960</b>
8	Fahmi Ridho, MZ, SKM NIP.19690802 199203 1 008 Penata / III c	KEPALA UPTD PUSKESMAS SULIKI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Suliki)	717.160.500
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas	586.090.000			
			<b>JUMLAH</b>	<b>1.303.250.500</b>
9	Ns. Masril, S.Kep NIP.19740605 199303 1 001 Penata / III c	KEPALA UPTD PUSKESMAS SITUJUH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Situjuh)	918.751.860
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Situjuh)	560.930.000			
			<b>JUMLAH</b>	<b>1.479.681.860</b>
10	Ns. Desi Fitria, S.Kep NIP.19810801 200501 2 009 Penata / III c	KEPALA UPTD PUSKESMAS RIMBO DATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Rimbo Data)	197.397.564
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Rimbo Data)	301.874.100			
			<b>JUMLAH</b>	<b>499.271.664</b>



NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN		
		STRUKTURAL	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU
1	2	3	4	5
11	Hendrawati, S.ST NIP.19710614 199012 2 001 Penata Tk.1 / III d	KEPALA UPTD PUSKESMAS BARUH GUNUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Peningkatan Pelayanan BLUD	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Baruh Gunuang)	300.628.898
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Baruh Gunuang)	384.840.000			
			<b>JUMLAH</b>	<b>685.468.898</b>
12	Depi Peringki, SKM NIP.19740928 199403 1 002 Penata Tk.1 / III d	KEPALA UPTD PUSKESMAS PANGKALAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Peningkatan Pelayanan BLUD	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pangkalan)	761.834.000
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Pangkalan)	518.120.000			
			<b>JUMLAH</b>	<b>1.279.954.000</b>
13	Ns. Joni Masda, S. Kep NIP.19750617 199503 1 005 Penata / III c	KEPALA UPTD PUSKESMAS BANJA LOWEH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Peningkatan Pelayanan BLUD	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Banja Loweh)	388.100.000
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Banja Loweh)	327.030.000			
			<b>JUMLAH</b>	<b>715.130.000</b>
14	drg. Meilita Wise Utami NIP. 19750513 200502 2 003 Pembina / IV a	KEPALA UPTD PUSKESMAS MUNGO	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Peningkatan Pelayanan BLUD	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Mungo)	1.496.223.930
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Mungo)	628.900.000			
			<b>JUMLAH</b>	<b>2.125.123.930</b>
15	Ns. Dediya, S.Kep NIP.197408161995031002 Pembina/ IV.a	KEPALA UPTD PUSKESMAS PAKAN RABAA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Peningkatan Pelayanan BLUD	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pakan Rabaa)	1.345.235.390
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Pakan Rabaa)	628.900.000			
			<b>JUMLAH</b>	<b>1.974.135.390</b>

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN		
		STRUKTURAL	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU
1	2	3	4	5
16	Syamsuardi, SKM NIP.19720924 199201 1 002 Penata Tk. I / III. d	KEPALA UPTD PUSKESMAS PILADANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Piladang)	386.942.700
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Piladang)	327.030.000			
			<b>JUMLAH</b>	<b>713.972.700</b>
17	dr. Helfi Riansyah NIP.19851128 201407 2 001 Penata / III. c	Pit. KEPALA UPTD PUSKESMAS BATU HAMPAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Batu Hampar)	944.065.198
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Batu Hampar)	467.810.000			
			<b>JUMLAH</b>	<b>1.411.875.198</b>
18	Parti Yasmi, S.ST NIP.19710710 199012 2 001 Penata / III c	KEPALA UPTD PUSKESMAS HALABAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Halaban)	640.454.640
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Halaban)	467.810.000			
			<b>JUMLAH</b>	<b>1.108.264.640</b>
19	dr. Rini Herlina NIP.19790824 201001 2 002 Penata Tk.I / III.d	KEPALA UPTD PUSKESMAS MUARO PAITI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Muaro Paiti)	792.102.300
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Muaro Paiti)	528.275.000			
			<b>JUMLAH</b>	<b>1.320.377.300</b>
20	Imrizal, SKM NIP.19690917 199001 1 001 Penata Tk.I / III.d	KEPALA UPTD PUSKESMAS SIALANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Sialang)	566.788.836
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Sialang)	399.840.000			
			<b>JUMLAH</b>	<b>966.628.836</b>

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN		
		STRUKTURAL	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU
1	2	3	4	5
21	drg. Erma Risydianti NIP.19751102 200501 2 009 Pembina / IV a	KEPALA UPTD PUSKESMAS KOTO BARU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Peningkatan Pelayanan BLUD	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Koto Baru SMLG)	1.919.900.433
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Koto Baru SMLG)	686.715.000			
			<b>JUMLAH</b>	<b>2.606.615.433</b>
22	dr. Silvia Rosja NIP. 19840409 201407 2 001 Penata Tk.I/ III.d	KEPALA UPTD PUSKESMAS DANGUNG-DANGUNG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Peningkatan Pelayanan BLUD	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Danggung- dangung)	1.352.411.520
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Danggung- dangung)	704.370.000			
			<b>JUMLAH</b>	<b>2.056.781.520</b>
23	drg. Yone Akdes NIP.19780704 200901 2 003 Penata Tk. I / III d	KEPALA UPTD PUSKESMAS MUNGKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Peningkatan Pelayanan BLUD	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Mungka)	886.048.680
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Mungka)	528.275.000			
			<b>JUMLAH</b>	<b>1.414.323.680</b>
24	Yufliida, SP NIP.19670930 198803 2 001 Pembina / IV a	KEPALA UPTD PUSKESMAS PADANG KANDIS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Peningkatan Pelayanan BLUD	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Padang Kandis)	333.873.321
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Padang Kandis)	377.340.000			
			<b>JUMLAH</b>	<b>711.213.321</b>
25	dr. Febriandi NIP.19810217 201101 1 001 Penata / III c	KEPALA UPTD PUSKESMAS KOTO TINGGI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Peningkatan Pelayanan BLUD	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Koto Tinggi)	657.888.780
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Koto Tinggi)	510.620.000			
			<b>JUMLAH</b>	<b>1.168.508.780</b>

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN		
		STRUKTURAL	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU
1	2	3	4	5
26	Ns. Yon Aprianto, S.Kep NIP.19740606 200604 1 012 Penata / III c K	KEPALA UPTD PUSKESMAS MAEK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Maek)	768.963.180
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas)	427.650.000
<b>JUMLAH</b>			<b>1.196.613.180</b>	

Ditetapkan di Payakumbuh,  
pada tanggal : 24 Januari 2022

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Selaku Pengguna Anggaran

dr. H. ADEL NOFIARMAN  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650914 199803 1 002